

LAPORAN



**HASIL PELAKSANAAN
ZONA INTEGRITAS (ZI)
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
PADA PENGADILAN NEGERI KAB.
KEDIRI KELAS I A**

**TRIWULAN III
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT, telah disusun Laporan Zona Integritas Survey Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Kab. Kediri Kelas I A Triwulan III tahun 2023 ini.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam perbaikan pelayanan *public* yang berorientasi wilayah bebas dari korupsi adalah dengan melakukan Survey Persepsi Anti Korupsi Zona Integritas kepada pengguna layanan pengadilan. Dalam survey ini data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrument kuesioner yang diisi tanpa melakukan tatap muka. Survey dilakukan kepada para pengunjung dan pengguna layanan Pengadilan Negeri Kab.Kediri Kelas IA.

Sebagai pertanggungjawaban atas Kinerja Tim Survey maka disusun laporan ini yang dimaksud untuk memberikan informasi bahwa Pengadilan Negeri Kab.Kediri Kelas IA mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil.

Semoga hasil Survey ini dapat membantu memberikan masukan yang positif bagi Pengadilan Negeri Kab.Kediri Kelas IA dan sekaligus menjadi acuan untuk meningkatkan pelayanan bagi pengguna layanan Pengadilan serta sebagai bahan untuk mengevaluasi kinerja organisasi agar dapat terwujudnya wilayah bersih dari korupsi.

Demikian Laporan Survey Persepsi Anti Korupsi pada pengadilan Negeri Kab. Kediri Kelas IA Triwulan III tahun 2023 ini disusun dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kediri, Oktober 2023
Ketua Tim.

Mengetahui
Pembina Pembangunan Zona Integritas
Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri



Asep Koswara
ASEP KOSWARA, SH.,MH.
NIP. 19681208 199403 1001

Gita Triyanto Nurcahyo
GITA TRIYANTO NURCAHYO, SE., SH.
NIP. 19790920 200604 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I	1
KUESIONER SURVEI	1
BAB II	3
METODOLOGI SURVEI	3
A. Kriteria Responden.....	3
B. Metode Pencacahan.....	3
C. Metode Pengolahan Data dan Analisis.....	3
BAB III	5
PENGOLAHAN SURVEI	5
A. Analisis Hasil Survei.....	5
B. Tindak Lanjut Hasil Survei.....	12
BAB IV	17
PENUTUP	17
A. Data Responden.....	18
B. Data Dukung Lainnya.....	21

DAFTAR TABEL

1) Indeks Pada Indikator Diskriminasi Pelayanan.....	5
2) Indeks Pelayanan Diluar Prosedur/Kecurangan pelayanan.....	7
3) Indeks Pada Indikator penerimaan imbalan Diluar Ketentuan.....	8
4) Indeks Pada Indikator Pungutan Liar.....	9
5) Indeks Pada Indikator Percaloan Tidak Resmi.....	10
6) Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri.....	11
7) Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri.....	12

DAFTAR GAMBAR

1) Briefing oleh Pimpinan Pengadilan Kepada Setiap Petugas PTSP	13
2) Daftar Waktu dan tariff Layanan di PTSP.....	14
3) Panduan Pelayanan Pembayaran PNPB Melalui Youtube Official	14
4) Petugs Pelayan Oleh Pihak Bank BTN.....	15
5) Kegiatan arahan singkat di bagian pelayanan PTSP.....	15
6) PTSP Pengadilan Negeri Kab. Kediri.....	16

BAB I

KUESIONER SURVEI

1. Apakah tidak ada diskriminasi pada pelayanan yang disampaikan pada unit layanan ini ?
 - Seluruh petugas pada pengadilan tidak pernah memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya
 - Sebagian besar petugas pada pengadilan tidak pernah memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya
 - Sebagian kecil petugas pada pengadilan tidak pernah memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya
 - Seluruh petugas pada pengadilan pernah memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya

2. Apakah tidak ada pelayanan diluar prosedur/ketentuan yang terindikasi kecurangan pada unit layanan ini ?
 - Seluruh pelayanan yang diberikan oleh petugas sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan
 - Sebagian besar pelayanan yang diberikan oleh petugas sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan
 - Sebagian kecil pelayanan yang diberikan oleh petugas sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan
 - Seluruh pelayanan yang diberikan oleh petugas tidak sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan

3. Apakah tidak ada penerimaan imbalan berupa uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada pengadilan ?
 - Petugas pelayanan tidak pernah menerima/bahkan meminta imbalan (uang, barang, fasilitas dll) diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan
 - Sebagian besar petugas pelayanan tidak pernah menerima/bahkan meminta imbalan (uang, barang, fasilitas dll) diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan
 - Petugas pelayanan sering menerima/bahkan meminta imbalan (uang, barang, fasilitas dll) diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan
 - Petugas pelayanan selalu menerima/bahkan meminta imbalan (uang, barang, fasilitas dll) diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan

4. Apakah tidak ada pungutan liar seperti permintaan pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi pada unit layanan ini ?
- Petugas layanan tidak pernah meminta pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan diluar tarif resmi seperti (Uang rokok, uang terima kasih dll)
 - Sebagian besar petugas layanan tidak pernah meminta pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan diluar tarif resmi seperti (uang rokok, uang terima kasih dll)
 - Sebagian besar petugas layanan sering meminta pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan diluar tarif resmi seperti (uang rokok, uang terima kasih dll)
 - Sebagian besar petugas layanan selalu meminta pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan diluar tarif resmi seperti (uang rokok, uang terima kasih dll)
5. Apakah tidak ada praktek percaloan/perantara yang tidak resmi yang diterapkan pada unit layanan ini ?
- Seluruh petugas pelayanan tidak pernah melakukan praktek percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan di pengadilan
 - Sebagian besar petugas pelayanan tidak pernah melakukan praktek percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan di pengadilan
 - Petugas pelayanan sering melakukan praktek percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan di pengadilan
 - Petugas pelayanan selalu melakukan praktek percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan di pengadilan

BAB II

METODOLOGI SURVEY

A. Kriteria Responden

Kriteria responden dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel responden yakni menggunakan teknik accidental sampling. Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai responden

B. Metode Pencacahan

Metode pencacahan yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengumpulan data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu tiga bulan atau data minimal 30 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan Zona Integritas (ZI) Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK).

C. Metode Pengolahan Data dan Analisis

Analisis data untuk menentukan indeks korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi

masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.

Kedua, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

BAB III

PENGOLAHAN SURVEY

A. Analisis Hasil Survey

1. Indeks persepsi korupsi per indikator.

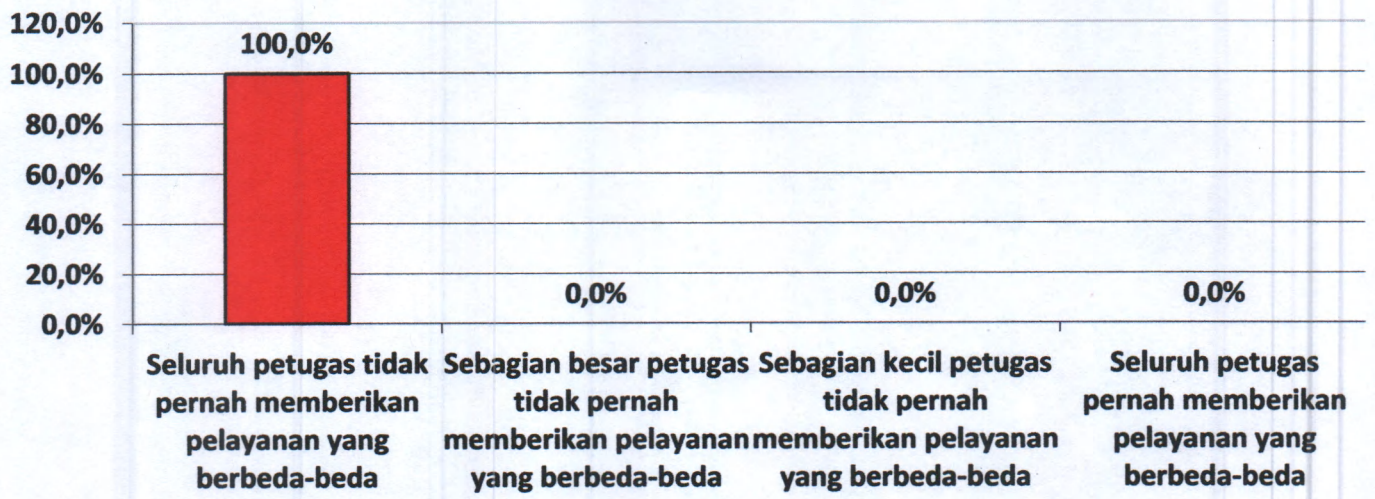
1.1 Indikator Diskriminasi Pelayanan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator diskriminasi pelayanan ini menunjukkan hasil pada index 4,000 Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari diskriminasi pelayanan.

Tabel 1.

Indeks pada indikator Diskriminasi Pelayanan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Seluruh petugas tidak pernah memberikan pelayanan yang berbeda-beda	4	51	100,0
2.	Sebagian besar petugas tidak pernah memberikan pelayanan yang berbeda-beda	3	0	0,0
3.	Sebagian kecil petugas tidak pernah memberikan pelayanan yang berbeda-beda	2	0	0,0
4.	Seluruh petugas pernah memberikan pelayanan yang berbeda-beda	1	0	0,0
		Jumlah	51	100.0



1.2. Indikator Pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan.

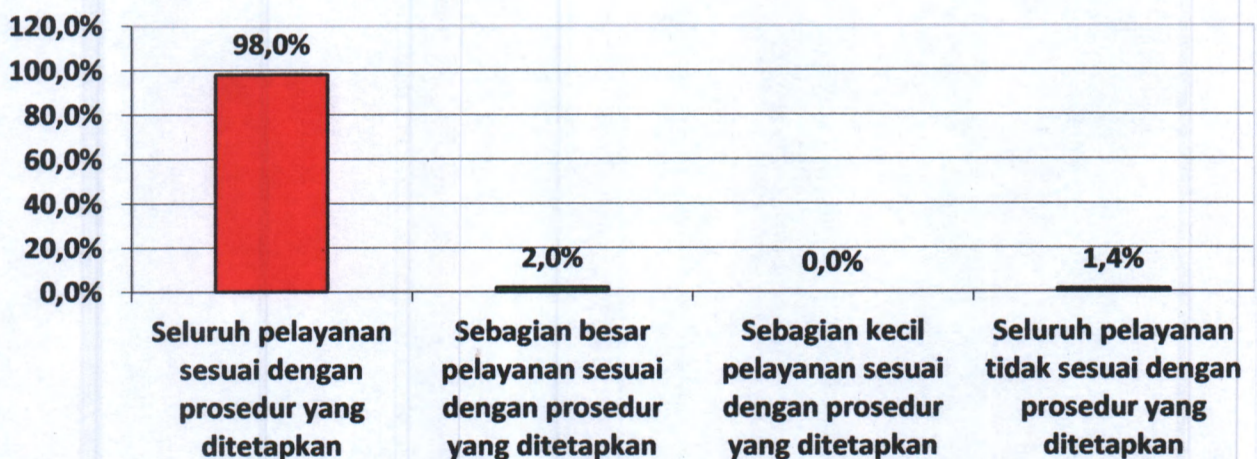
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan ini menunjukkan hasil pada index 3,980

Indeks tersebut menunjukkan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari Pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan.

Tabel 2.

Indeks Pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Seluruh pelayanan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan	4	50	98,0
2.	Sebagian besar pelayanan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan	3	1	2,0
3.	Sebagian kecil pelayanan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan	2	0	0,0
4.	Seluruh pelayanan tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan	1	2	1,4
Jumlah			51	100.0



1.3. Indikator Penerimaan Imbalan diluar ketentuan.

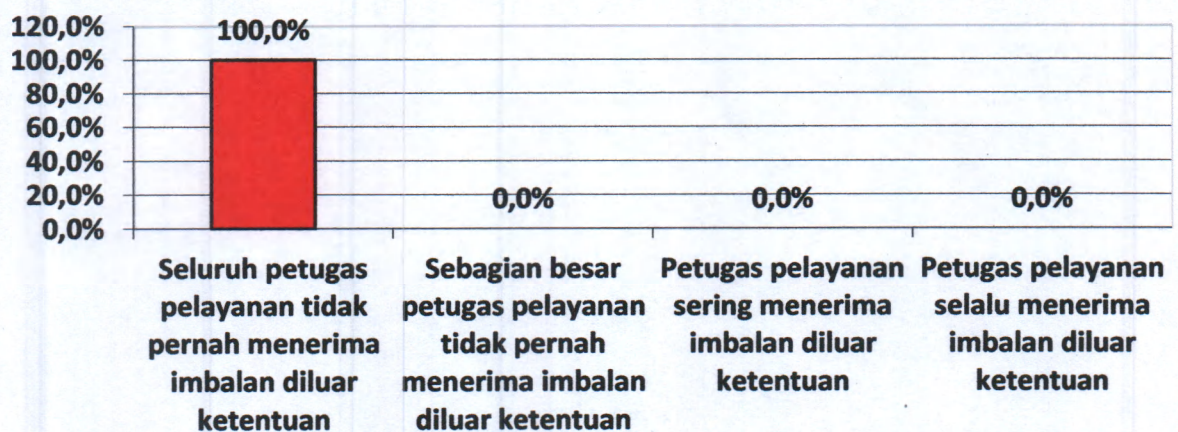
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penerimaan Imbalan diluar ketentuan ini menunjukkan hasil pada index 4,000

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dan tidak ada yang menerima imbalan diluar ketentuan.

Tabel 3.

Indeks pada indikator Penerimaan Imbalan diluar ketentuan.

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Seluruh petugas pelayanan tidak pernah menerima imbalan diluar ketentuan	4	51	100,0
2.	Sebagian besar petugas pelayanan tidak pernah menerima imbalan diluar ketentuan	3	0	0,0
3.	Petugas pelayanan sering menerima imbalan diluar ketentuan	2	0	0,0
4.	Petugas pelayanan selalu menerima imbalan diluar ketentuan	1	0	0,0
		Jumlah	51	100.0



1.4. Indikator Pungutan Liar

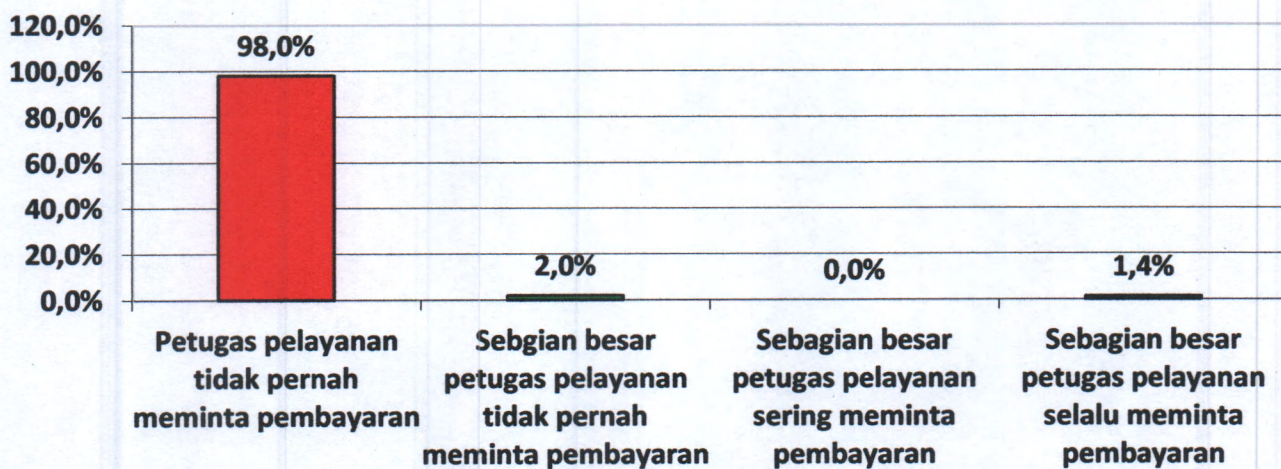
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Pungutan Liar ini menunjukkan hasil pada index 3,980

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan tidak ada pungutan liar.

Tabel 4.

Indeks pada indikator pungutan liar

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Petugas pelayanan tidak pernah meminta pembayaran	4	50	98,0
2.	Sebgian besar petugas pelayanan tidak pernah meminta pembayaran	3	1	2,0
3.	Sebagian besar petugas pelayanan sering meminta pembayaran	2	0	0,0
4.	Sebagian besar petugas pelayanan selalu meminta pembayaran	1	0	0,0
Jumlah			51	100.0



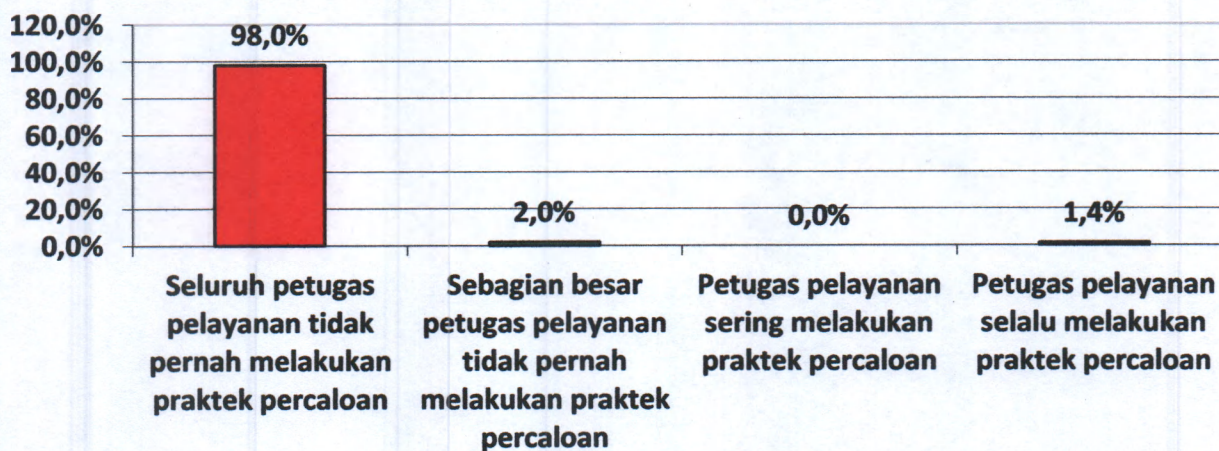
1.5. Indikator Percaloan Tidak Resmi

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan Tidak Resmi ini menunjukkan hasil pada index 3,980. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan tidak menerapkan adanya Percaloan Tidak Resmi.

Tabel 5.

Indeks pada indikator Percaloan Tidak Resmi

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Seluruh petugas pelayanan tidak pernah melakukan praktek percaloan	4	50	98,0
2.	Sebagian besar petugas pelayanan tidak pernah melakukan praktek percaloan	3	1	2,0
3.	Petugas pelayanan sering melakukan praktek percaloan	2	0	0,0
4.	Petugas pelayanan selalu melakukan praktek percaloan	1	0	0,0
		Jumlah	51	100.0



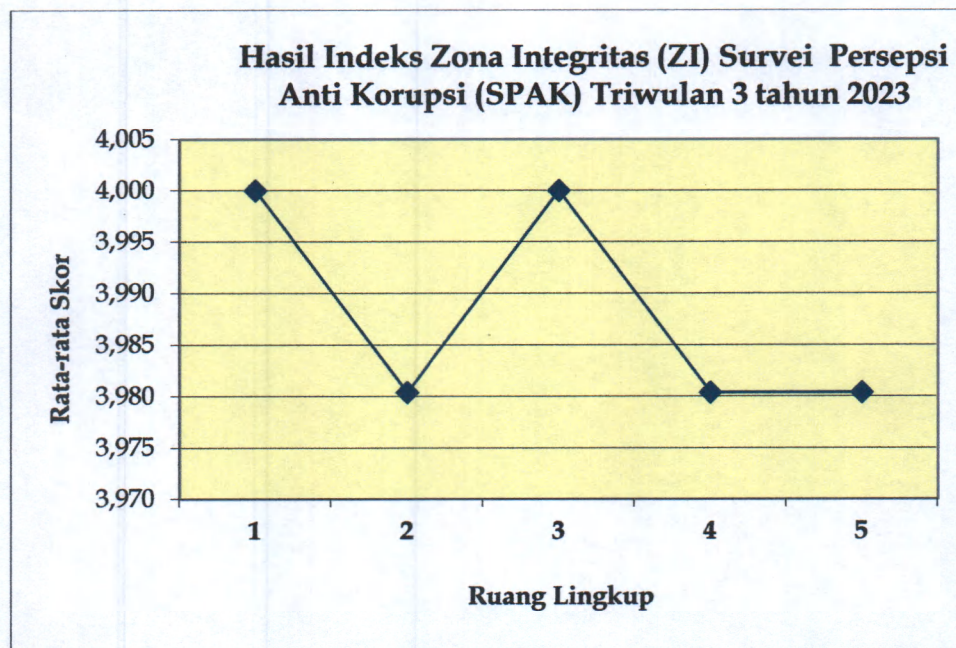
2. Indeks Zona Integritas Survey Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri

Dari indeks 5 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Survey Persepsi Anti Korupsi Zona Integritas Satuan Kerja Pengadilan Negeri Kab. Kediri sebesar 99,71.

Tabel 6.

Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri

Ket	Indikator					
	Diskriminasi pelayanan	Pelayanan diluar prosedur	Penerimaan diluar ketentuan	Pungutan Liar	Percaloan Tidak Resmi	
Jumlah	204	203	204	203	203	
NRR per RL	4.000	3.980	4.000	3.980	3.980	
NRR Tertimbang	0.800	0.796	0.800	0.796	0.796	3,988
NILAI PERSEPSI ANTI KORUPSI						99,71



Indeks 99,71 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 81,26 – 100,00.

Tabel 7.
Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada
Pengadilan Negeri Kab. Kediri

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidakbersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

B. Tindak Lanjut Hasil Survei

Dari hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap hasil Zona Integritas Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada Triwulan II tahun 2023, adapun nilai tertinggi dan terendahnya sebagai berikut:

- Indeks Survey Kepuasan Masyarakat Tertinggi terdapat pada:
 1. Tidak ada diskriminasi pada pelayanan yang disampaikan pada unit layanan ? dengan nilai rata-rata 4,000 kategori sangat baik;
 2. Tidak ada penerimaan imbalan berupa uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada pengadilan ?, dengan nilai rata-rata 4,000 kategori sangat baik.
 3. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/ketentuan yang terindikasi kecurangan pada unit layanan ?, dengan nilai rata-rata 3,980 kategori sangat baik.

- Indeks Survey Kepuasan Masyarakat Terendah terdapat pada:
 1. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/ketentuan yang terindikasi kecurangan pada unit layanan ini ?, dengan nilai rata-rata 3,980 kategori sangat baik.
 2. Tidak ada pungutan liar seperti permintaan pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi pada unit layanan ini ?, dengan nilai rata-rata 3,980 kategori sangat baik.
 3. Tidak ada praktek percaloan/perantara yang tidak resmi yang diterapkan pada unit layanan ini ?, dengan nilai rata-rata 3,980 kategori sangat baik.

Tindak Lanjut Atas Indeks Zona Integritas Survei Persepsi Anti Korupsi Terendah sebagai berikut:

1. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/ketentuan yang terindikasi kecurangan pada unit layanan ini;
 - Pimpinan Pengadilan Negeri Kab. Kediri melakukan *briefing* menyampaikan agar pegawai PTSP memahami alur penanganan pelayanan sesuai dengan SOP yang berlaku;



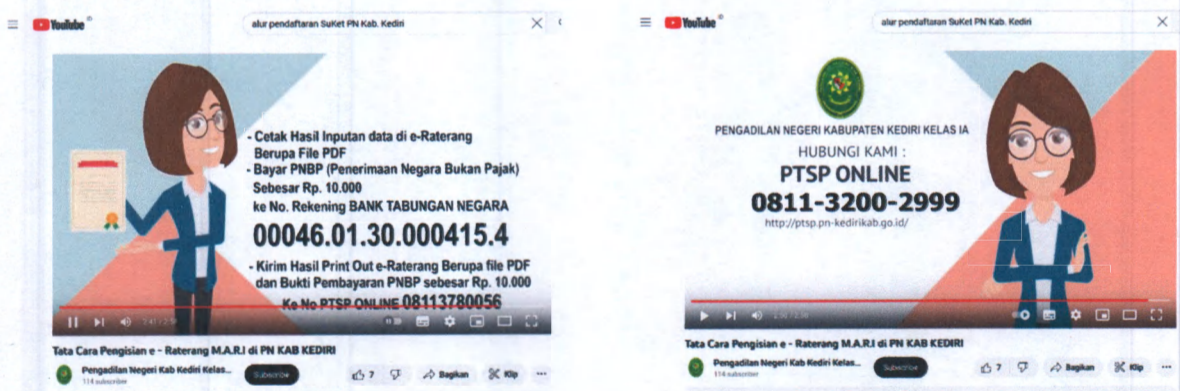
Gambar 1. Briefing oleh Pimpinan Pengadilan kepada setiap petugas PTSP

- Pimpinan Pengadilan Negeri Kab. Kediri menenkankan kepada pegawai PTSP untuk mengetahui alur pelayanan kepada pencari keadilan melalui *checklist* daftar alur pelayanan



Gambar 2. Daftar Waktu dan Tarif layanan di PTSP

2. Tidak ada pungutan liar seperti permintaan pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi pada unit layanan ini
 - Pimpinan Pengadilan Negeri Kab. Kediri melakukan inovasi terobosan baru melalui panduan kanal *Youtube Official* yaitu WA PTSP Online guna memberitahu informasi mengenai hal-hal pembayaran administrative di dalam Pengadilan Negeri Kab. Kediri



Gambar 3. Panduan pelayanan pembayaran PNPB melalui Youtube Official

- Pimpinan Pengadilan Negeri Kab. Kediri melakukan pengawasan dibagian pelayanan terutama pada unit Bank dan Kasir Pengadilan Negeri Kab. Kediri supaya setiap pembayaran sesuai tariff yang berlaku



Gambar 4. Petugas pelayan oleh pihak Bank BTN

3. Tidak ada praktek percaloan/perantara yang tidak resmi yang diterapkan pada unit layanan ini
 - Pimpinan Pengadilan Negeri Kab. Kediri melalui Hakim Pengawas PTSP melakukan *briefing* kepada setiap petugas pelayanan di bagian PTSP untuk selalu memberikan bimbingan dan arahan untuk tidak menerima imbalan apapun dan tidak melakukan praktek percaloan



Gambar 5. Kegiatan arahan singkat dibagian pelayanan PTSP

- Setiap petugas PTSP harus selalu meningkatkan kinerja yang PRIMA dan sesuai dengan kinerja yang telah diberlakukan



Gambar 6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu PN Kab. Kediri.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Zona Integritas Survey Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Kab. Kediri diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri memiliki Indeks Persepsi Korupsi 99,71 **atau** masuk pada kategori BERSIH DARI KORUPSI

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 5 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Diskriminasi Pelayanan, mendapat indeks 4,000
2. Indikator pelayanan Diluar Prosedur, mendapat indeks 3,980
3. Indikator Penerimaan Imbalan Diluar Ketentuan, mendapat indeks 4,000
4. Indikator Pungutan Liar, mendapat indeks 3,980
5. Indikator Percaloan Tidak Resmi, mendapat indeks 3,980

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil Zona Integritas indeks Survey Persepsi Anti Korupsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Kab. Kediri Tahun 2023 bulan Juli - September tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 99,71 atau masuk pada persepsi 81,26 – 100,00. Namun dari lima indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa semua indikator memiliki indeks tinggi semua.

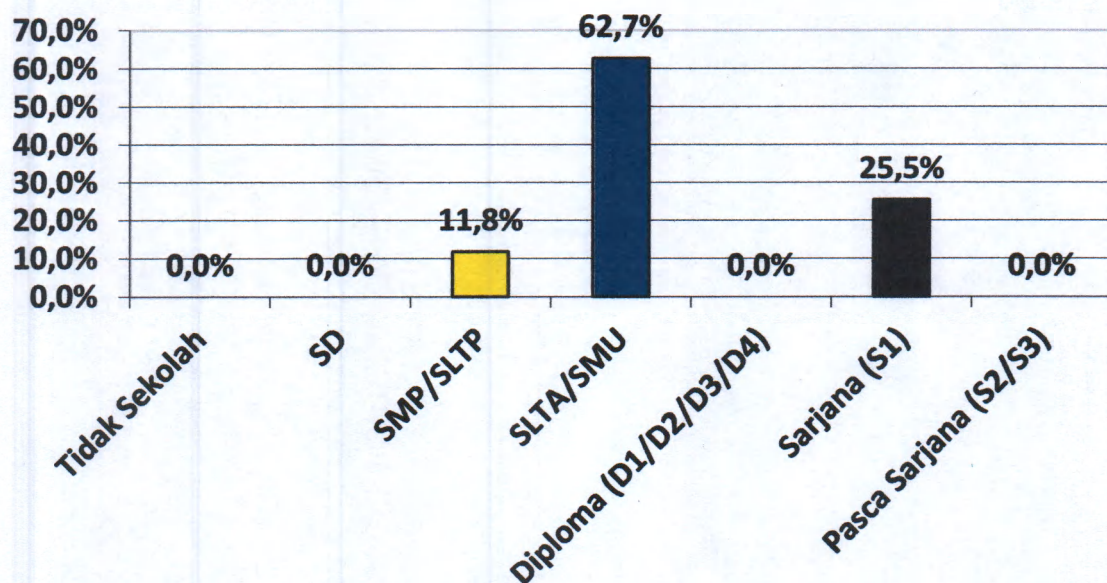
4.3. Profil responden

4.3.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki pendidikan terakhir SLTA yaitu sebanyak 32 responden dengan persentase 62,7 %.

Tabel 4.
Tingkat pendidikan responden

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
1	Tidak Sekolah	0	0
2	SD	0	0,0
3	SMP / SLTP	6	11,8
4	SLTA/SMU	32	62,7
5	Diploma (D1/D2/D3/D4)	0	0,0
6	Sarjana (S1)	13	25,5
7	Pasca Sarjana (S2/S3)	0	0,0
Jumlah		51	100.0



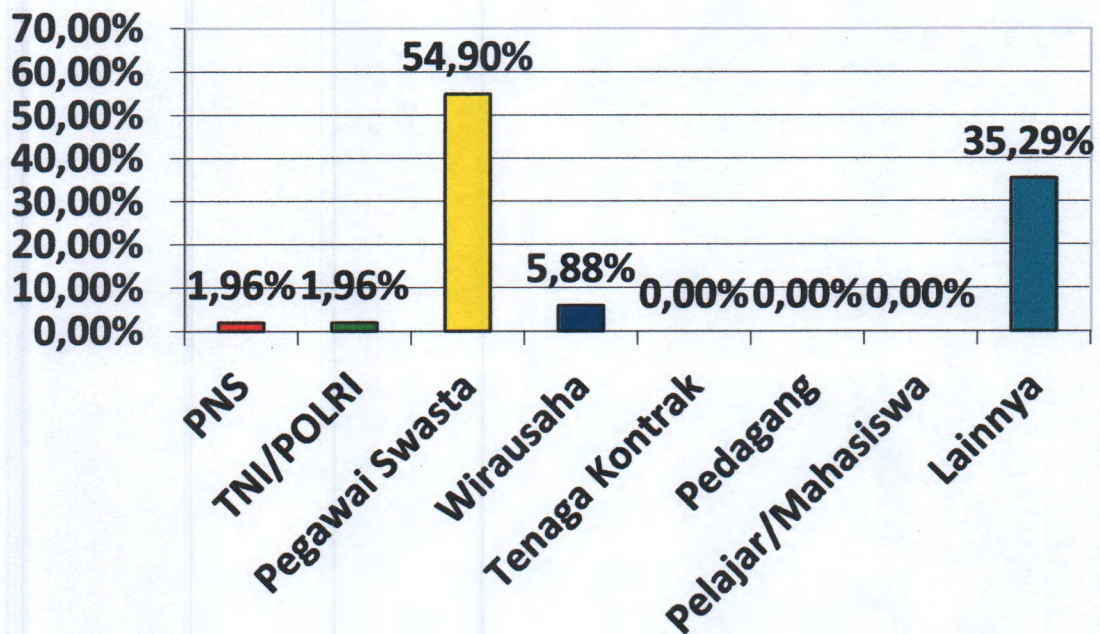
4.3.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebanyak 28 responden sebesar 54,9 % responden pengguna

layanan Satuan Kerja pada pengadilan memiliki pekerjaan sebagai Swasta .

Tabel 5.
Jenis pekerjaan responden

No	Pekerjaan Utama	Frekuensi	%
1	PNS	1	1,96
2	TNI/POLRI	1	1,96
3	Pegawai Swasta	28	54,9
4	Wirausaha	3	5,88
5	Tenaga Kontrak	0	0,0
6	Pedagang	0	0,0
7	Pelajar / Mahasiswa	0	0,0
8	Lainnya	18	35,29
Jumlah		51	100.0

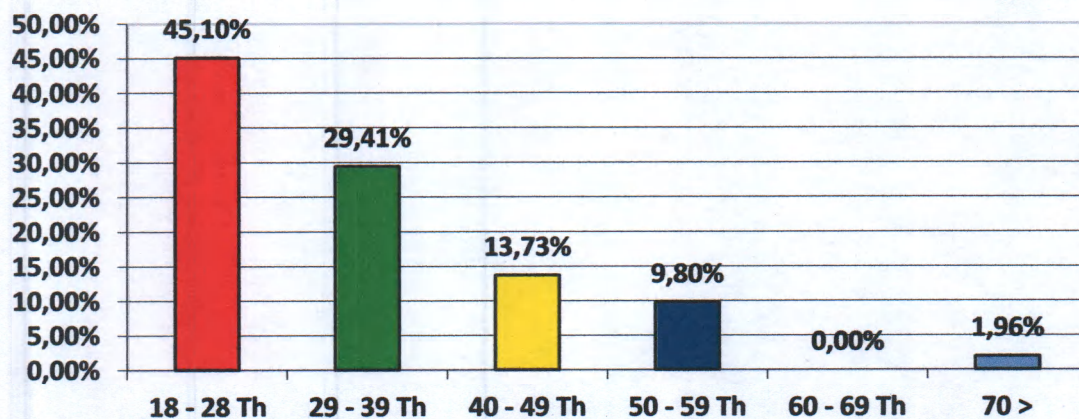


4.3.3. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 18 tahun s/d 28 tahun yaitu sebanyak 23 responden atau sebesar 45,10%. Bagi kelompok usia di atas 29 tahun, jumlah responden semakin mengecil, demikian pula kelompok usia di atas 70 tahun.

Tabel 6.
Usia responden

No	Umur	Frekuensi	%
1	18 – 28 Th	23	45,10
2	29 – 39 Th	15	29,41
3	40 – 49 Th	7	13,73
4	50 – 59 Th	5	9,80
5	60 - 69 Th	0	0,0
6	70>	1	1,96
Jumlah		51	100.0



DATA DUKUNG LAINNYA

ANALISIS DATA ZONA INTEGRITAS (ZI)
SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
TRIWULAN III BULAN JULI – SEPTEMBER TAHUN 2023
DENGAN NILAI INDEKS 3,99 / 99,71 %

Frequency Table

VAR00001

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.00	51	100.0	100.0	100.0

VAR00002

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	1	2.0	2.0	2.0
	4.00	50	98.0	98.0	100.0
	Total	51	100.0	100.0	

VAR00003

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4.00	51	100.0	100.0	100.0

VAR00004

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	1	2.0	2.0	2.0
	4.00	50	98.0	98.0	100.0
	Total	51	100.0	100.0	

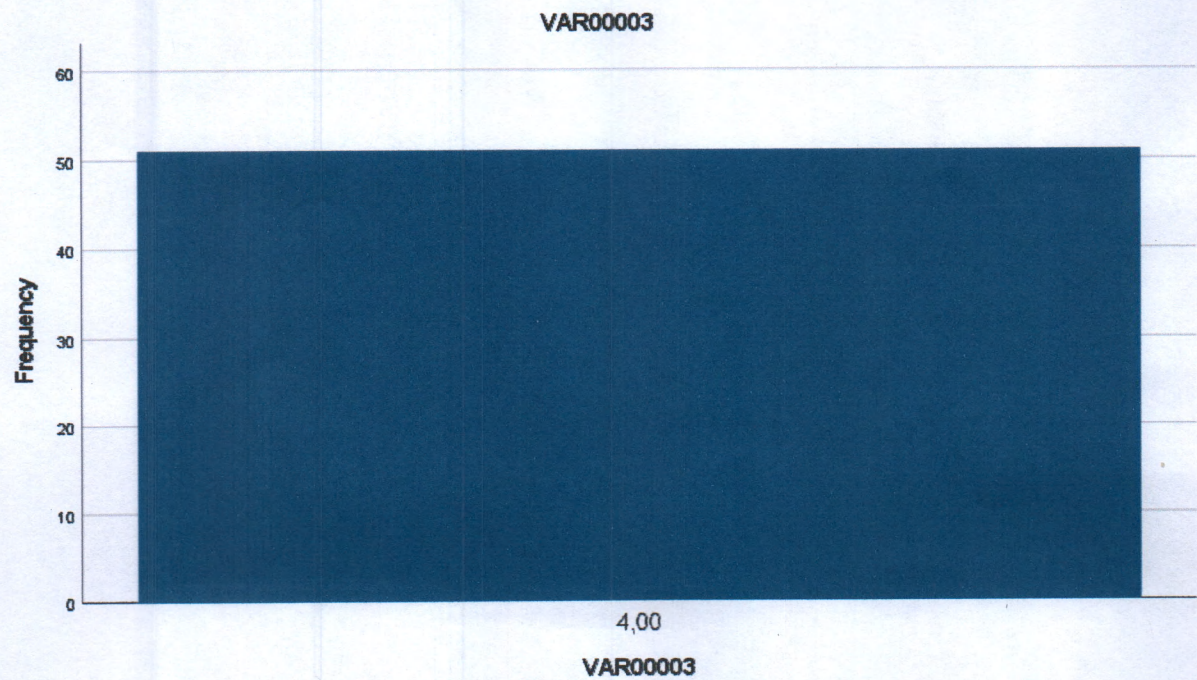
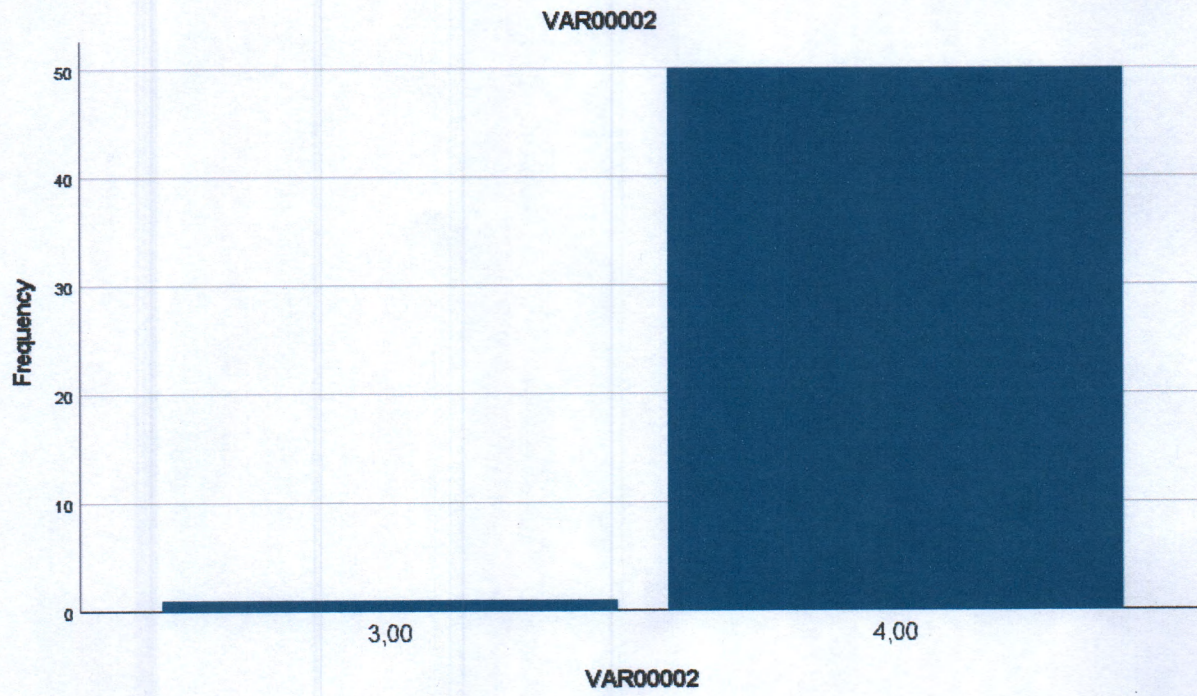
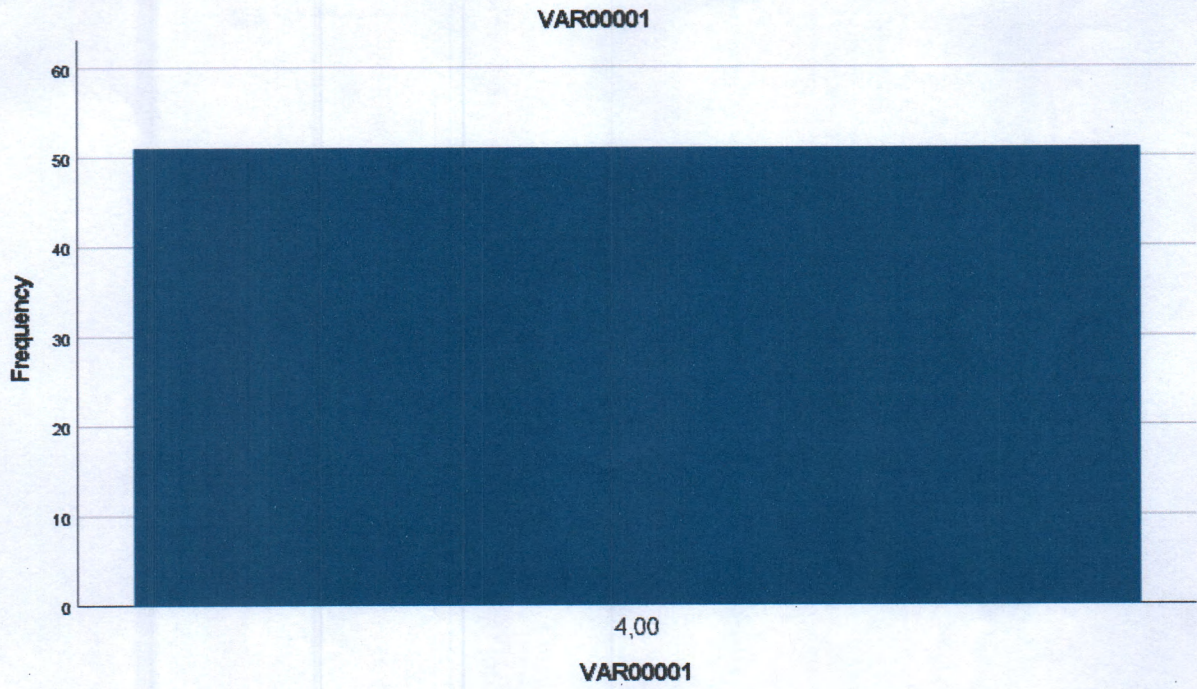
VAR00005

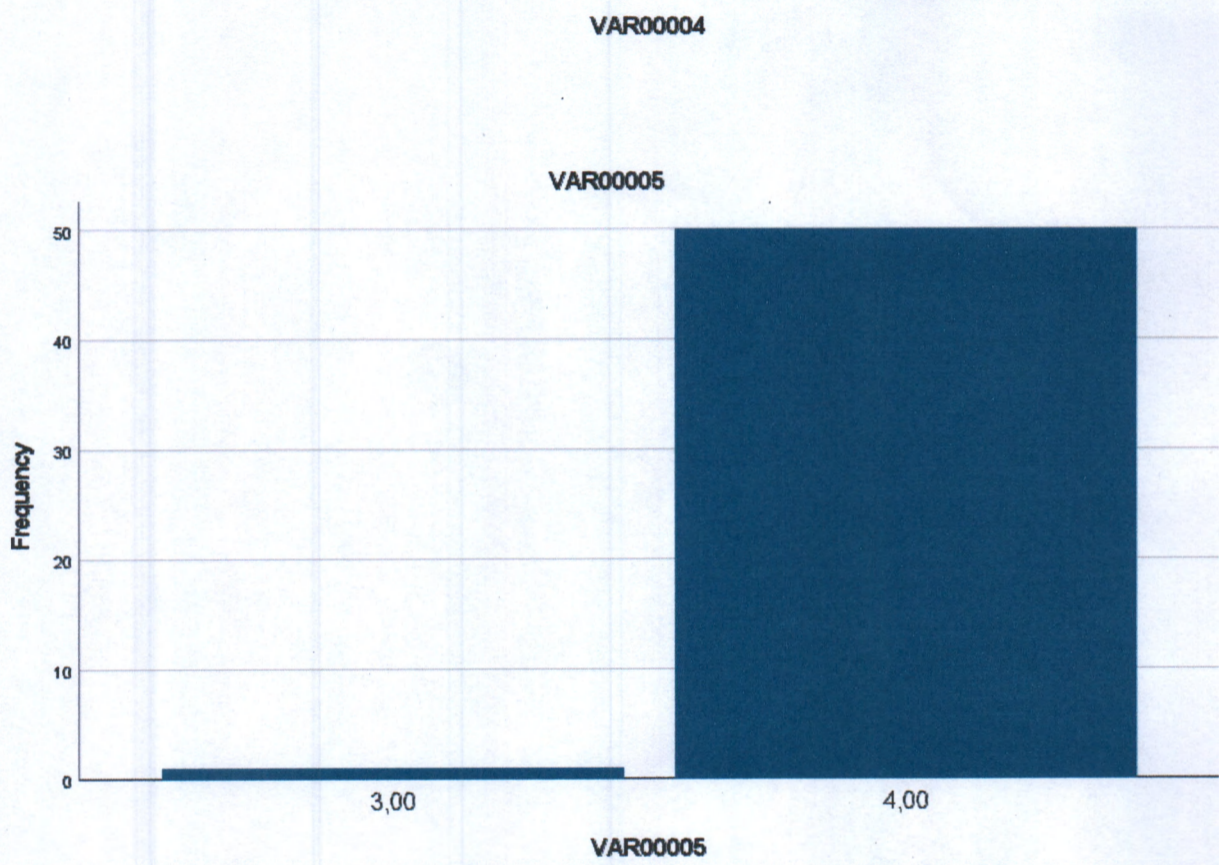
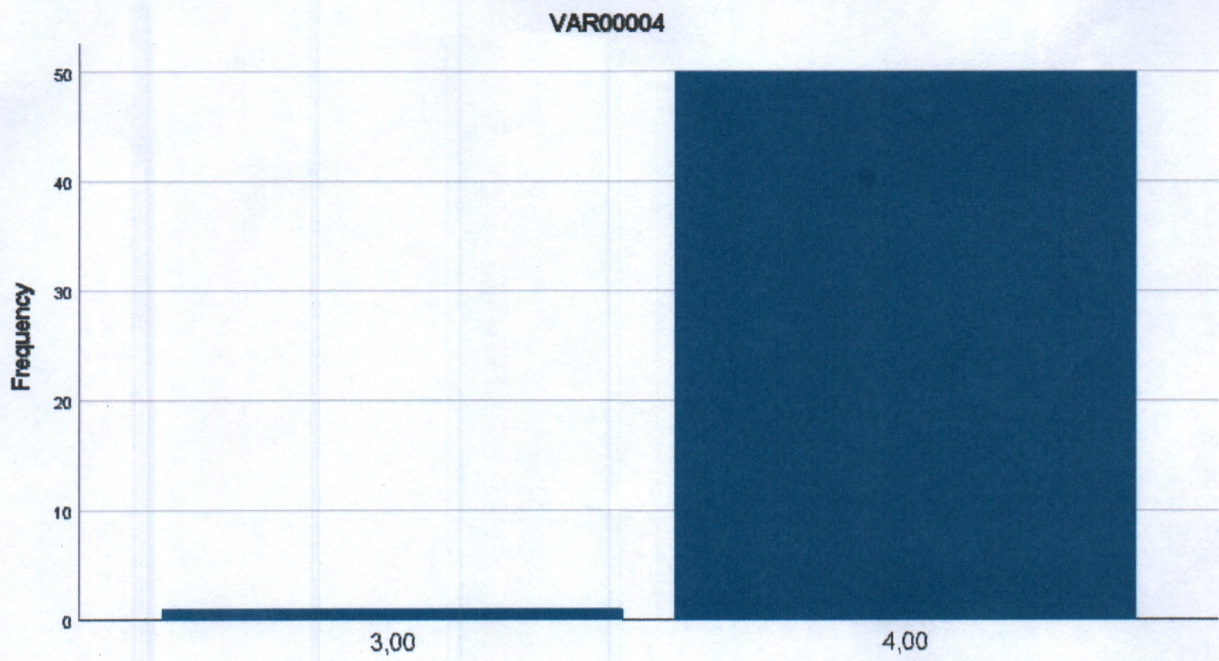
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	1	2.0	2.0	2.0
	4.00	50	98.0	98.0	100.0
	Total	51	100.0	100.0	

Statistics

		VAR00001	VAR00002	VAR00003	VAR00004	VAR00005
N	Valid	51	51	51	51	51
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		4.0000	3.9804	4.0000	3.9804	3.9804
Median		4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
Mode		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Sum		204.00	203.00	204.00	203.00	203.00

Bar Chart





ANALISIS DATA
ZONA INTEGRITAS (ZI) SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI
JL. PAMENANG NO. 60 KEDIRI.
0354. 682056/ Fax. 0354. 682056.

No. Resp	NILAI PERSEPSI KORUPSI					Keterangan
	1	2	3	4	5	
1	4	4	4	4	4	
2	4	4	4	4	4	
3	4	4	4	4	4	
4	4	4	4	4	4	
5	4	4	4	4	4	
6	4	3	4	3	4	
7	4	4	4	4	4	
8	4	4	4	4	4	
9	4	4	4	4	4	
10	4	4	4	4	4	
11	4	4	4	4	4	
12	4	4	4	4	4	
13	4	4	4	4	4	
14	4	4	4	4	4	
15	4	4	4	4	4	
16	4	4	4	4	4	
17	4	4	4	4	4	
18	4	4	4	4	4	
19	4	4	4	4	4	
20	4	4	4	4	4	
21	4	4	4	4	4	
22	4	4	4	4	4	
23	4	4	4	4	4	
24	4	4	4	4	4	
25	4	4	4	4	4	
26	4	4	4	4	4	
27	4	4	4	4	4	
28	4	4	4	4	4	
29	4	4	4	4	4	
30	4	4	4	4	4	
31	4	4	4	4	4	
32	4	4	4	4	4	
33	4	4	4	4	4	
34	4	4	4	4	4	
35	4	4	4	4	4	
36	4	4	4	4	4	
37	4	4	4	4	4	
38	4	4	4	4	4	
39	4	4	4	4	4	
40	4	4	4	4	4	
41	4	4	4	4	4	

42	4	4	4	4	4	
43	4	4	4	4	3	
44	4	4	4	4	4	
45	4	4	4	4	4	
46	4	4	4	4	4	
47	4	4	4	4	4	
48	4	4	4	4	4	
49	4	4	4	4	4	
50	4	4	4	4	4	
51	4	4	4	4	4	
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						

94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						
101						
102						
103						
104						
105						
106						
107						
108						
109						
110						
111						
112						
113						
114						
115						
116						
117						
118						
119						
120						
121						
122						
123						
124						
125						
126						
127						
128						
129						
130						
131						
132						
133						
134						
135						
136						
137						
138						
139						
140						
141						
142						
143						
144						
145						

146						
147						
148						
149						
150						
Jumlah	204	203	204	203	203	
NRR per RL	4,000	3,980	4,000	3,980	3,980	
NRR Tertimbang	0,800	0,796	0,800	0,796	0,796	3,988
NILAI PERSEPSI KORUPSI						99,71

Keterangan :

- RL = Ruang Lingkup Persepsi Korupsi
- NRR = Nilai rata-rata
- SPAK = Survey Persepsi Anti Korupsi
- *) = Jumlah NRR IKM tertimbang
- **) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
- NRR Per RL = Jumlah nilai per Indikator dibagi dengan jumlah kuesioner yang terisi
- NRR tertimbang = NRR per Indikator x (1/5)

INDEKS SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI : 99,71
Kategori: BERSIH DARI KORUPSI

Nilai Persepsi Korupsi :

- 4 (Bersih dari Korupsi) : 81,26 - 100,00 : 3,26 - 4,00
- 3 (Cukup Bersih dari Korupsi) : 62,51 - 81,25 : 2,51 - 3,25
- 2 (Kurang Bersih dari Korupsi) : 43,76 - 62,50 : 1,76 - 2,50
- 1 (Tidak Bersih dari Korupsi) : 25,00 - 43,75 : 1,00 - 1,75

Tabel

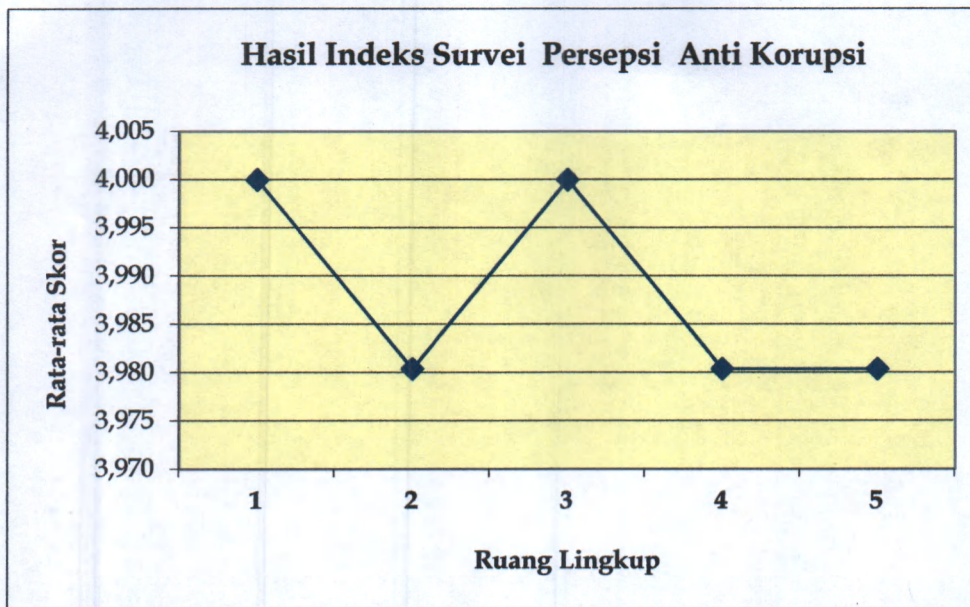
RINGKASAN INDEKS SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

Indeks Survey Persepsi Anti Korupsi:

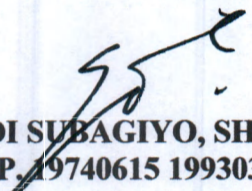
99,71

Kategori: BERSIH DARI KORUPSI


Nomor	Ruang Lingkup / Indikator	Nilai	Kategori	Peringkat
1	Tidak Ada Diskriminasi Pelayanan	4,000	Sangat Baik	1
2	Tidak Ada Diluar Prosedur/Kecurangan Pelayanan	3,980	Sangat Baik	3
3	Tidak Ada Penerimaan Imbalan Diluar Ketentuan Pelayanan	4,000	Sangat Baik	1
4	Tidak Ada Pungutan Liar	3,980	Sangat Baik	3
5	Tidak Ada Percaloan/Perantara Tidak Resmi	3,980	Sangat Baik	3



**QUALITY MANAGER
REPRESENTATIVE**


EDI SUBAGIYO, SH., MH.
 NIP. 19740615 199303 1 001

**KETUA TIM SURVEI
INDEKS PERSEPSI KORUPSI
Pit. PANITERA**


JAJOEK TRI SOESILOWATI, SH., MH.
 NIP. 19660109 199303 2 003

**KETUA TIM PENJAMINAN MUTU
PENGADILAN NEGERI**



ASEP KOSWARA, SH., MH.
 NIP. 19681208 199403 1 001